



SDG 16

Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
Peace, Justice, & Strong Institutions



SDG 16

Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat Peace, Justice, and Strong Institutions

SDG 16 bertujuan untuk membangun masyarakat yang damai, adil, dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, serta menyediakan akses kepada semua orang terhadap keadilan. Dalam konteks global, tujuan ini menekankan pentingnya lembaga yang transparan, akuntabel, dan inklusif di semua tingkat. SDG 16 mencakup berbagai aspek, termasuk menghilangkan terjadinya kekerasan dan penyalahgunaan, perlindungan hak asasi manusia, serta pemberian akses yang lebih baik terhadap keadilan bagi semua individu. Tujuan ini sejalan dengan upaya untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan, yang merupakan fondasi utama bagi kemajuan sosial dan ekonomi.

Di Indonesia, tantangan terkait keadilan dan perdamaian masih menjadi isu krusial yang perlu diatasi. Berbagai konflik sosial, masalah hak asasi manusia, dan ketidakadilan hukum merupakan tantangan yang dihadapi masyarakat. Dalam konteks ini, penerapan SDG 16 menjadi sangat relevan. Pembangunan lembaga yang kuat dan berfungsi sebagai pilar dalam memastikan penegakan hukum dan keadilan menjadi salah satu kunci untuk mencapai masyarakat yang lebih damai dan adil.

Universitas Indonesia sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian SDG 16. Melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, UI tidak hanya berkomitmen untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya perdamaian dan keadilan, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan kebijakan yang dapat meningkatkan integritas dan akuntabilitas lembaga-lembaga di Indonesia. Dengan memfasilitasi dialog antara pemangku kepentingan, mengembangkan kurikulum yang relevan, serta berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain, UI berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pencapaian tujuan ini.

Dalam mendukung terwujudnya SDG 16 yang berfokus pada institusi yang kuat, inklusif, dan akuntabel, Universitas Indonesia telah melaksanakan berbagai inisiatif yang sejalan dengan tema besar tahun ini, yaitu "UI sebagai Model Kota Kampus Berkelanjutan dengan Teknologi Hijau untuk Energi Bersih Indonesia." UI berperan aktif dalam menciptakan lingkungan akademik dan kelembagaan yang transparan serta menjunjung tinggi keadilan, yang merupakan elemen penting dalam mewujudkan keberlanjutan kampus.

Salah satu langkah nyata UI dalam menciptakan institusi yang akuntabel adalah melalui penerapan tata kelola yang transparan, sesuai dengan prinsip *good university governance*. Hal ini tercermin dalam sistem audit dan evaluasi rutin terhadap kinerja akademik dan administratif, yang dilakukan secara independen dan berkala. Proses audit ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas institusi serta memastikan bahwa setiap kebijakan dan program dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial.

Camaba yang diterima terdiri atas 599 S1 jalur Reguler, 1.218 S1 jalur Non Reguler, 192 Vokasi D3, dan 116 Vokasi D4. Dari seluruh camaba S1 jalur Reguler yang lolos, terdapat 93 camaba yang merupakan pendaftar program Kartu Indonesia Pintar Kuliah.

SDG 16 seeks to build peaceful, just, and inclusive societies for sustainable development and to ensure access to justice for all. In a global context, this goal emphasizes the need for transparent, accountable, and inclusive institutions at all levels. SDG 16 addresses a wide range of issues, including eliminating violence and abuse, protecting human rights, and providing better access to justice for all individuals. This goal aligns with efforts to create lasting peace, which serves as a crucial foundation for social and economic progress.

In Indonesia, challenges related to justice and peace remain pressing issues that require immediate attention. Social conflicts, human rights concerns, and legal injustices are some of the obstacles faced by society. In this context, implementing SDG 16 is highly relevant. Building strong institutions that uphold law enforcement and justice is key to fostering a more peaceful and just society.

Universitas Indonesia (UI), as a leading higher education institution, plays a strategic role in supporting the achievement of SDG 16. Through education, research, and community service, UI is committed to increasing knowledge and awareness about peace and justice while contributing to policy development that enhances institutional integrity and accountability in Indonesia. By facilitating dialogue among stakeholders, developing relevant curricula, and collaborating with various institutions, UI strives to create an environment conducive to achieving this goal.

To support the realization of SDG 16, which emphasizes strong, inclusive, and accountable institutions, UI has undertaken various initiatives in line with this year's central theme: "UI as a Model of Sustainable Campus City with Green Technology for Clean Energy in Indonesia". UI is actively creating a transparent academic and institutional environment that upholds justice, a critical component of campus sustainability.

One of UI's tangible efforts to build accountable institutions is the implementation of transparent governance based on the principles of *good university governance*. This can be seen through a routine audit and evaluation system of academic and administrative performance, conducted independently and periodically. This audit process aims to enhance institutional accountability and ensure that every policy and program adheres to principles of sustainability and social justice.

The newly admitted students consist of 599 Regular Undergraduate (S1) students, 1,218 Non-Regular Undergraduate (S1) students, 192 Vocational Diploma 3 (D3) students, and 116 Vocational Diploma 4 (D4) students. Among all Regular Undergraduate (S1) students who were accepted, 93 were applicants for the Smart Indonesia Card College program.

Selain itu, UI juga telah mengembangkan berbagai kebijakan yang mendorong inklusivitas. Kampus ini secara aktif memfasilitasi keterlibatan seluruh lapisan masyarakat akademik, termasuk mahasiswa dari wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), melalui program beasiswa dan dukungan keuangan. Di tahun 2023, Universitas Indonesia mencatat bahwa lebih dari 1.500 mahasiswa dari wilayah 3T menerima bantuan pendidikan, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam pendidikan tinggi tanpa kendala finansial. Langkah ini sejalan dengan tujuan SDG 16 untuk menyediakan akses yang adil terhadap keadilan dan layanan pendidikan bagi semua orang.

Dalam hal teknologi dan inovasi untuk keberlanjutan, UI terus mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung keterbukaan informasi publik. Melalui platform daring dan aplikasi yang transparan, UI memastikan bahwa seluruh kebijakan, keputusan, serta hasil riset dapat diakses oleh masyarakat luas, termasuk data mengenai anggaran, pengeluaran, dan laporan kinerja tahunan. Implementasi teknologi ini merupakan bagian dari upaya UI untuk meningkatkan efisiensi institusi serta memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Upaya yang dilakukan oleh UI dalam memperkuat institusi yang adil dan inklusif mencerminkan langkah nyata menuju pembangunan kampus yang berkelanjutan. Dengan tata kelola yang semakin terbuka dan kebijakan yang inklusif, UI tidak hanya memenuhi target SDG 16 tetapi juga membuktikan posisinya sebagai model institusi pendidikan yang berperan aktif dalam mendukung keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan di Indonesia.

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Kebijakan yang Diterapkan

Universitas Indonesia telah mengadopsi berbagai kebijakan yang mendukung pencapaian SDG 16, dengan fokus pada keadilan, perdamaian, dan penguatan lembaga yang kuat. Kebijakan ini mencakup pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Salah satu kebijakan utama adalah pengembangan kurikulum yang menekankan pada pendidikan karakter dan nilai-nilai keadilan sosial. Melalui program studi yang berfokus pada hukum, hak asasi manusia, dan resolusi konflik, UI berupaya membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi agen perubahan di masyarakat.

Dalam rangka memperkuat kelembagaan, UI juga menerapkan kebijakan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Hal ini dilakukan melalui pengembangan sistem manajemen yang berbasis pada prinsip-prinsip good governance. UI berkomitmen untuk memastikan bahwa semua proses pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa, staf, dan masyarakat.

In addition, UI has developed policies that promote inclusivity. The campus actively supports the participation of all members of its academic community, including students from underdeveloped, frontier, and outermost (3T) regions, through scholarship programs and financial assistance. In 2023, UI reported that more than 1,500 students from 3T regions received educational support, enabling them to pursue higher education without financial constraints. This effort aligns with SDG 16's aim to provide equitable access to justice and education for all.

In the area of technology and innovation for sustainability, UI continues to promote the use of digital tools to ensure public information transparency. Through online platforms and applications, UI makes policies, decisions, and research findings accessible to the wider community, including data on budgets, expenditures, and annual performance reports. This technological approach enhances institutional efficiency and provides improved services to the public.

UI's commitment to strengthening fair and inclusive institutions exemplifies its real efforts toward sustainable campus development. With increasingly transparent governance and inclusive policies, UI not only fulfills the SDG 16 target but also reinforces its status as a model educational institution, actively contributing to social, economic, and environmental sustainability in Indonesia.

POLICIES AND STRATEGIES

Implemented Policies

UI has adopted a range of policies to support the achievement of SDG 16, emphasizing justice, peace, and the strengthening of robust institutions. These policies are rooted in a holistic approach that integrates education, research, and community service.

One key policy focuses on developing a curriculum that emphasizes character education and social justice values. By offering study programs centered on law, human rights, and conflict resolution, UI aims to equip students with the knowledge and skills necessary to become agents of change in society.

To strengthen institutional frameworks, UI implements policies that promote transparent and accountable governance. This is achieved through the development of a management system grounded in good governance principles. UI is dedicated to ensuring that all decision-making processes are conducted openly and involve diverse stakeholder participation, including students, staff, and the community.



SDG 16

Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat Peace, Justice, and Strong Institutions

Salah satu inisiatif utama UI dalam mendorong tata kelola inklusif adalah pelaksanaan forum diskusi dan dialog publik yang melibatkan seluruh elemen komunitas kampus. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan staf untuk menyampaikan aspirasi dan pandangan mereka mengenai berbagai isu yang dihadapi oleh universitas. Dengan cara ini, UI berusaha untuk memastikan bahwa semua suara didengar dan dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan dan strategi institusi.

Selain itu, Universitas Indonesia juga memanfaatkan platform digital untuk meningkatkan transparansi informasi. Portal informasi publik UI menyediakan akses mudah kepada semua pemangku kepentingan terhadap data dan laporan penting, termasuk laporan keuangan, kebijakan akademik, dan hasil penelitian. Inisiatif ini tidak hanya mempermudah pemangku kepentingan dalam mendapatkan informasi yang relevan, tetapi juga menciptakan ruang bagi masyarakat untuk memberikan umpan balik yang konstruktif.

UI kembali menerima penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023 dari Komisi Informasi Pusat sebagai Perguruan Tinggi Negeri berpredikat "Informatif" dengan nilai 93.80. Predikat ini selalu diraih UI sejak 2020.

Dalam rangka memperkuat tata kelola yang transparan, UI mengimplementasikan kebijakan anti-korupsi dan etika yang ketat. Universitas telah menetapkan kode etik yang jelas bagi seluruh civitas akademika, serta menyediakan pelatihan tentang integritas dan tanggung jawab. Dengan ini, diharapkan tercipta budaya yang menolak praktik korupsi dan mendorong perilaku etis di dalam lingkungan akademik.

Pengukuran dan evaluasi berkala terhadap efektivitas tata kelola juga menjadi bagian penting dari strategi UI. Universitas melakukan survei dan penilaian terhadap sistem yang ada untuk memastikan bahwa kebijakan dan praktik yang diterapkan relevan dan dapat memenuhi harapan komunitas. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar dalam perbaikan berkelanjutan dan penyesuaian kebijakan untuk meningkatkan kualitas tata kelola.

Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, menyediakan akses informasi yang transparan, serta menerapkan kebijakan etika yang ketat, Universitas Indonesia berupaya menciptakan tata kelola yang inklusif dan transparan. Hal ini sejalan dengan tema besar SDG UI dan bertujuan untuk membangun kepercayaan di antara semua pihak, serta mempromosikan tanggung jawab sosial yang lebih luas dalam lingkungan pendidikan tinggi.

Pencegahan Kekerasan dan Diskriminasi

Sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang aman dan adil, UI memperkuat inisiatif untuk mencegah kekerasan dan diskriminasi dalam segala bentuknya. Pada tahun 2023, UI melanjutkan kampanye anti-kekerasan yang sudah ada, termasuk pelatihan bagi staf dan mahasiswa mengenai pencegahan kekerasan berbasis gender. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan isu-isu kekerasan dan diskriminasi, serta membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mencegah dan menangani situasi yang tidak diinginkan.

One of UI's key initiatives for fostering inclusive governance is the establishment of discussion forums and public dialogues that engage all members of the campus community. These forums create opportunities for students and staff to voice their aspirations and perspectives on various issues affecting the university. By doing so, UI seeks to ensure that all voices are considered in the formulation of institutional policies and strategies.

UI also leverages digital platforms to enhance transparency. The UI public information portal offers stakeholders easy access to important data and reports, including financial statements, academic policies, and research findings. This initiative not only simplifies access to relevant information but also provides a platform for public feedback and constructive dialogue.

UI once again received the 2023 Public Information Openness Award from the Central Information Commission, as a State University earning the "Informative" status with a score of 93.80. UI has consistently achieved this distinction since 2020.

To reinforce transparent governance, UI has enacted strict anti-corruption and ethics policies. The university has established a clear code of ethics for its academic community and offers training on integrity and responsibility. These measures aim to cultivate a culture that rejects corruption and promotes ethical conduct within the academic environment.

Regular measurement and evaluation of governance effectiveness form a crucial part of UI's strategy. The university conducts surveys and assessments of its systems to ensure that implemented policies and practices remain relevant and meet community expectations. Findings from these evaluations serve as a foundation for ongoing improvements and policy adjustments to enhance governance quality.

By engaging all stakeholders, providing transparent access to information, and enforcing stringent ethical standards, UI is committed to fostering inclusive and transparent governance. This approach aligns with UI's SDG goals and seeks to build trust among all parties while promoting broader social responsibility within the higher education sector.

Prevention of Violence and Discrimination

As part of its commitment to fostering a safe and just environment, UI has enhanced initiatives to prevent violence and discrimination in all forms. In 2023, UI continued its anti-violence campaign, offering training sessions for staff and students on preventing gender-based violence. These sessions aim to raise awareness about issues of violence and discrimination while equipping participants with the knowledge and skills needed to prevent and address such situations.

Sebagai bagian dari upaya ini, UI juga telah mendirikan layanan pendampingan psikologis bagi korban kekerasan. Layanan ini memberikan dukungan emosional dan psikologis, serta membantu korban dalam mengakses layanan hukum yang diperlukan. UI berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kampus yang tidak hanya aman, tetapi juga mendukung pemulihan dan rehabilitasi bagi mereka yang mengalami kekerasan.

Dalam upaya mewujudkan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual, Universitas Indonesia memberikan penyediaan fasilitas kerja yang memadai bagi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual UI. Ruang kerja dan rapat yang dilengkapi dengan peralatan pendukung telah disediakan di Gedung Perpustakaan Lama, Kampus UI Depok.

Pembentukan Satgas PPKS UI merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Rektor No. 2441/SK/R/UI/2022, yang secara resmi mengukuhkan keberadaan satuan tugas ini. Para anggota Satgas PPKS UI telah dipilih melalui proses seleksi yang ketat dan transparan, termasuk uji publik.

Satgas PPKS UI memiliki peran yang sangat penting dalam menangani laporan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Setelah menerima laporan, Satgas akan melakukan pemeriksaan secara komprehensif dan tertutup terhadap korban, saksi, dan terlapor. Hasil pemeriksaan kemudian akan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi penanganan yang tepat. Rekomendasi tersebut akan disampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti dan dipantau pelaksanaannya oleh Satgas PPKS UI.

Selain penanganan kasus, Satgas PPKS UI juga berkomitmen untuk memberikan pemulihan bagi korban yang meliputi aspek medis, psikologis, dan sosial. Terhadap pelaku yang terbukti bersalah, akan diberikan sanksi berupa program konseling. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan serupa di kemudian hari.

Universitas Indonesia mengajak seluruh civitas akademika untuk aktif berperan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Pelaporan dapat dilakukan melalui laman <http://linktr.ee/SatgasPPKSUI> atau melalui email SatgasPPKSUI@gmail.com. Dengan kerja sama yang baik, diharapkan lingkungan kampus UI dapat menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua.

UI has established a psychological assistance service for victims of violence, offering emotional support and aiding in access to legal services. This initiative reflects UI's dedication to creating a safe, supportive campus environment that fosters recovery and rehabilitation for those affected by violence.

To ensure a campus environment free from sexual violence, UI provides adequate facilities for the UI Sexual Violence Prevention and Handling Task Force (PPKS). The task force has dedicated work and meeting rooms equipped with supportive tools in the Old Library Building on the UI Depok Campus.

The establishment of the UI PPKS Task Force follows the issuance of the Rector's Decree No. 2441/SK/R/UI/2022, officially confirming the existence of this task force. Its members were chosen through a rigorous and transparent selection process, including a public assessment.

The PPKS UI Task Force plays a crucial role in handling reports of sexual violence on campus. Upon receiving a report, the task force conducts a comprehensive and confidential examination involving the victim, witnesses, and the reported party. The findings are analyzed to generate conclusions and recommendations for appropriate handling measures. These recommendations are then submitted to the Chancellor for follow-up, with continued monitoring by the PPKS UI Task Force.

Beyond case handling, the PPKS UI Task Force is also committed to providing holistic recovery support for victims, covering medical, psychological, and social aspects. Perpetrators found guilty will face sanctions, including a counseling program, to prevent future occurrences of similar actions.

UI encourages the entire academic community to take an active role in preventing and addressing sexual violence. Reports can be made through <http://linktr.ee/SatgasPPKSUI> or via email at SatgasPPKSUI@gmail.com. With collaborative efforts, UI aims to create a campus environment that is safe and supportive for all.



SDG 16

Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat Peace, Justice, and Strong Institutions

Berikut adalah beberapa langkah dan upaya UI dalam pencegahan kekerasan dan diskriminasi sepanjang tahun 2023:

Below are some of UI's steps and efforts to prevent violence and discrimination throughout 2023:

No	Kegiatan Activity	Tanggal Date	Deskripsi Description
1	Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Socialization on the Prevention and Handling of Sexual Violence	Juli 2023 July 2023	Fakultas Ilmu Komputer mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman tentang kekerasan seksual dan langkah-langkah penanganannya. The Faculty of Computer Science held a session to enhance understanding of sexual violence and measures for addressing it.
2	Pelatihan Pencegahan dan Penindakan Perundungan Training on Bullying Prevention and Enforcement	Agustus 2023 August 2023	FISIP UI menyelenggarakan pelatihan bagi guru, dosen, dan tenaga kependidikan untuk mencegah dan menangani perundungan di lingkungan pendidikan. FISIP UI organized training for teachers, lecturers, and academic staff to prevent and address bullying in educational settings.
3	Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) Establishment of the Task Force for the Prevention and Handling of Sexual Violence (PPKS Task Force)	2023	UI membentuk Satgas PPKS untuk menangani kasus kekerasan seksual dan memberikan perlindungan bagi korban. UI established the PPKS Task Force to address cases of sexual violence and provide protection for victims.
4	Peraturan BEM UI tentang Pelaporan dan Penanganan Kekerasan Seksual BEM UI Regulation on Reporting and Handling Sexual Violence	2023	BEM UI menetapkan peraturan untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkup internal, termasuk mekanisme pelaporan yang jelas. BEM UI implemented regulations to prevent and address sexual violence within its internal scope, including a clear reporting mechanism.

*Upaya UI dalam Pencegahan Kekerasan dan Diskriminasi (2023)

*UI's Efforts in Preventing Violence and Discrimination (2023)

UI juga memfasilitasi platform pengaduan daring yang memungkinkan pelapor untuk mengakses bantuan hukum dan perlindungan. Dengan memanfaatkan teknologi, UI menciptakan ruang yang aman bagi individu untuk melaporkan kasus kekerasan dan diskriminasi tanpa rasa takut akan stigma atau pembalasan. Melalui penguatan program-program ini, UI berupaya memastikan terciptanya lingkungan kampus yang aman dan inklusif bagi seluruharganya.

UI also facilitates an online complaint platform, enabling individuals to access legal aid and protection. By leveraging technology, UI creates a safe space for reporting cases of violence and discrimination without fear of stigma or retaliation. By strengthening these initiatives, UI aims to ensure a secure and inclusive campus environment for all members of its campus community.

Keterlibatan Mahasiswa dalam Proses Pengambilan Keputusan

Universitas Indonesia terus memberikan ruang yang lebih luas bagi mahasiswa untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat kelembagaan. Pada tahun 2023, mahasiswa UI terlibat aktif dalam berbagai komite internal yang berfokus pada kebijakan pendidikan, penelitian, dan pengembangan infrastruktur kampus. Keterlibatan ini bukan hanya memberikan suara bagi mahasiswa, tetapi juga membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi mereka.

Student Involvement in the Decision-Making Process

UI continues to expand opportunities for student participation in institutional decision-making. In 2023, UI students were actively involved in various internal committees focusing on education policy, research, and campus infrastructure development. This involvement not only amplifies student voices but also helps shape policies that are more responsive to their needs and aspirations.

Program yang mendorong keterlibatan mahasiswa dalam tata kelola kampus, seperti forum dialog antara mahasiswa dan pimpinan universitas, semakin diperkuat untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih inklusif. Melalui forum-forum ini, mahasiswa dapat menyampaikan pendapat dan usulan mereka langsung kepada pengambil keputusan, sehingga menciptakan sinergi yang positif antara mahasiswa dan pimpinan universitas.

Programs designed to foster student involvement in campus governance, such as dialogue forums between students and university leaders, have been strengthened to promote more inclusive decision-making. Through these forums, students can directly share their opinions and suggestions with decision-makers, creating positive synergy between the student body and university leadership.

Mahasiswa Arsitektur FTUI berinovasi dengan merancang ruang memorial interaktif bernama "DIALOGUE". Rancangan ini mengajak pengunjung untuk merasakan pengalaman sebagai korban ketidakadilan sosial, sehingga diharapkan dapat meningkatkan empati. Karya mereka berhasil meraih penghargaan internasional.

Inisiatif ini tidak hanya memperkuat hubungan antara mahasiswa dan pihak universitas, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan kepemimpinan mahasiswa. Dengan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, mahasiswa belajar untuk berkolaborasi, bernegosiasi, dan mengadvokasi kepentingan mereka secara efektif. Hal ini merupakan langkah penting dalam membangun budaya demokrasi dan keterlibatan aktif di dalam komunitas kampus.

Melalui upaya yang terintegrasi ini, Universitas Indonesia menegaskan komitmennya untuk menciptakan lingkungan yang adil dan transparan, di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan akademik dan sosial mereka.

Penegakan Hukum dan Keadilan Sosial

UI juga berperan aktif dalam mendukung sistem penegakan hukum di Indonesia melalui pendidikan dan riset di bidang hukum. Fakultas Hukum UI telah menjadi pusat penelitian hukum terkemuka yang menghasilkan riset yang relevan untuk mendukung kebijakan publik di bidang keadilan dan penegakan hukum. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek teoritis, tetapi juga menyentuh isu-isu praktis yang dihadapi dalam implementasi hukum di masyarakat.

Pada tahun 2023, UI memperluas kerja sama dengan institusi hukum nasional seperti Mahkamah Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan lembaga hukum lainnya. Melalui program magang mahasiswa hukum, UI memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman langsung dalam proses hukum di Indonesia. Program ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan praktis mahasiswa dan memperdalam pemahaman mereka tentang sistem hukum yang berlaku. Kegiatan magang di institusi hukum ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan generasi muda dalam bidang penegakan hukum dan keadilan. Dengan pengalaman ini, mahasiswa diharapkan dapat lebih siap untuk menghadapi tantangan di dunia hukum setelah lulus, serta mampu berkontribusi secara positif dalam upaya penegakan hukum dan keadilan sosial di Indonesia.

UI juga berkomitmen untuk menjadi suara dalam advokasi keadilan sosial melalui berbagai kegiatan akademis dan non-akademis. Keterlibatan dalam penelitian, seminar, dan diskusi publik menjadi bagian integral dari upaya untuk menyebarluaskan pemahaman tentang pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan. Melalui pendekatan ini, UI berharap dapat berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih sadar hukum dan menghargai prinsip keadilan.

Architecture students from FTUI showcased innovation by designing an interactive memorial space titled "DIALOGUE", which invites visitors to experience the perspective of social injustice victims, fostering empathy. Their project earned international recognition.

This initiative strengthens the connection between students and the university while contributing to student leadership development. By engaging in the decision-making process, students gain valuable experience in collaboration, negotiation, and advocacy. This is a key step toward cultivating a culture of democracy and active participation within the campus community.

Through this integrated effort, UI reaffirms its commitment to fostering a fair and transparent environment where every individual has the opportunity to contribute to and participate in decisions affecting their academic and social lives.

Law Enforcement and Social Justice

UI actively contributes to the strengthening of Indonesia's law enforcement system through legal education and research. The UI Faculty of Law has become a leading legal research center, producing studies that support public policy in the areas of justice and law enforcement. This research goes beyond theoretical aspects, addressing practical issues faced in the implementation of law in society.

In 2023, UI expanded its collaboration with national legal institutions, including the Supreme Court, the Corruption Eradication Commission (KPK), and other legal entities. Through its law student internship program, UI offers students opportunities to gain firsthand experience in Indonesia's legal processes. This program aims to enhance students' practical skills and deepen their understanding of the country's legal system. Internships at these institutions are expected to enrich the knowledge and skills of young people in law enforcement and justice. With such experience, students will be better equipped to face challenges in the legal field after graduation and contribute positively to law enforcement and social justice efforts in Indonesia.

UI is also dedicated to advocating for social justice through academic and non-academic activities. Engagement in research, seminars, and public discussions is integral to spreading awareness of the importance of fair and transparent law enforcement. Through this approach, UI seeks to foster a society that is more legally aware and committed to upholding justice.



SDG 16

Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat
Peace, Justice, and Strong Institutions

Penguatan Kelembagaan untuk Pembangunan Berkelanjutan

UI secara konsisten mengembangkan sistem kelembagaan yang mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan. Di tahun 2023, UI melakukan peninjauan terhadap kebijakan internalnya melalui audit kelembagaan untuk memastikan bahwa semua unit kerja mengikuti prinsip tata kelola yang baik dan bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan bersama. Proses audit ini bertujuan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan pengembangan, serta untuk meningkatkan efisiensi dalam operasional institusi.

Institutional Strengthening for Sustainable Development

UI consistently works on developing institutional systems that support sustainable development goals. In 2023, UI undertook a review of its internal policies through an institutional audit to ensure that all work units adhere to good governance principles and work collaboratively toward shared objectives. This audit process is intended to identify areas for improvement and development while enhancing institutional efficiency.



UI selenggarakan Rapat Kerja Bersama Unit Kerja Khusus di Ruang Apung Perpustakaan UI. Kegiatan ini secara rutin diadakan Direktorat Pengelolaan dan Pengembangan Unit-Unit Usaha (DPPU)

UI regularly organizes Joint Working Meetings for Special Work Units, held in the UI Library Floating Room, coordinated by the Directorate of Management and Development of Business Units (DPPU).

Sebagai bagian dari upaya tersebut, UI juga mengembangkan berbagai program pelatihan bagi staf administrasi dan manajerial. Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas staf dalam mendukung tata kelola yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan perubahan yang terjadi di lingkungan pendidikan tinggi. Dengan peningkatan kapasitas ini, diharapkan staf UI dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

As part of this initiative, UI also offers training programs for administrative and managerial staff to improve their capacity to support more efficient governance and respond effectively to changes in the higher education environment. This capacity-building effort aims to ensure that UI staff are more effective in their duties, contributing to the institution's overall goal of achieving sustainable development.

UI berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap unit kerja berfungsi secara optimal dalam rangka mendukung visi dan misi institusi. Melalui penguatan kelembagaan ini, UI berharap dapat menciptakan lingkungan akademik yang mendukung kolaborasi, inovasi, dan partisipasi aktif dari seluruh elemen yang terlibat. Pendekatan ini sejalan dengan upaya UI untuk menjadi institusi yang responsif terhadap tantangan dan peluang dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.

UI remains committed to optimizing the performance of every work unit to support its vision and mission. By strengthening its institutional framework, UI aspires to create an academic environment that promotes collaboration, innovation, and active participation from all stakeholders. This approach aligns with UI's goal of becoming an institution that responds adeptly to challenges and opportunities in pursuing sustainable development.

RISET DAN INOVASI

Penelitian di Bidang Hukum dan Keadilan

Universitas Indonesia terus mendukung riset-riset yang berfokus pada pengembangan tata kelola kelembagaan yang baik serta penegakan hukum yang adil. Di tahun 2023, UI telah menerbitkan sejumlah kajian terkait reformasi kelembagaan di sektor publik, antikorupsi, dan sistem peradilan. Kajian ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap literatur akademik, tetapi juga menjadi masukan penting bagi para pembuat kebijakan di Indonesia.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI, misalnya, aktif melakukan penelitian tentang kebijakan publik dan tata kelola yang efektif di berbagai tingkatan pemerintahan. Melalui berbagai program penelitian, FISIP berupaya untuk mengeksplorasi tantangan dan peluang dalam penerapan tata kelola yang baik di sektor publik. Penelitian ini berfokus pada evaluasi kebijakan yang ada serta rekomendasi untuk perbaikan, sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif dan inklusif.

Fakultas Psikologi UI jalin kerja sama riset dengan Universidad Nacional de Educación a Distancia, Spanyol. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan dampak atau pengaruh riset melalui studi lintas negara dan kolaborasi antar universitas dan peneliti, terutama yang terkait dengan topik ekstremisme kekerasan.

RESEARCH AND INNOVATION

Research in the Field of Law and Justice

UI continues to promote research aimed at enhancing institutional governance and ensuring fair law enforcement. In 2023, UI published several studies focusing on institutional reform in the public sector, anti-corruption measures, and the justice system. These studies contribute not only to academic literature but also provide crucial insights for policymakers in Indonesia.

The Faculty of Social and Political Sciences (FISIP), for instance, actively conducts research on public policy and effective governance across various levels of government. Through numerous research programs, FISIP examines the challenges and opportunities involved in implementing good governance in the public sector. This research evaluates existing policies and offers recommendations for improvement, ultimately striving to produce more responsive and inclusive policies.

The UI Faculty of Psychology has established a research collaboration with Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) in Spain. This partnership aims to enhance the impact of research through cross-border studies and collaborations among universities and researchers, particularly focusing on topics related to violent extremism.

No	Nama Riset Research Name	Tanggal Date	Riset yang Dilakukan Conducted Research	Hasil yang Dihasilkan Results	Dukungan Support
1	Penelitian Hukum tentang Perlindungan Data Pribadi Legal Research on Personal Data Protection	Januari-Maret 2023 January-March 2023	Penelitian mengenai regulasi dan implementasi perlindungan data pribadi di Indonesia. Research on the regulation and implementation of personal data protection in Indonesia.	Rekomendasi kebijakan untuk perbaikan regulasi perlindungan data pribadi. Policy recommendations for improving personal data protection regulations.	Kementerian Komunikasi dan Informatika Ministry of Communication and Information Technology
2	Kajian tentang Akses ke Keadilan bagi Masyarakat Rentan Study on Access to Justice for Vulnerable Groups	April-Juni 2023 April-June 2023	Analisis terhadap akses keadilan bagi kelompok masyarakat rentan di Indonesia. Analysis of access to justice for vulnerable groups in Indonesia.	Laporan tentang hambatan akses keadilan dan rekomendasi untuk meningkatkan layanan hukum. Report on barriers to justice access and recommendations for improving legal services.	Lembaga Bantuan Hukum Legal Aid Institute
3	Riset tentang Korupsi dan Penegakan Hukum Research on Corruption and Law Enforcement	Juli-September 2023 July-September 2023	Penelitian mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap kasus korupsi di Indonesia. Research on the effectiveness of law enforcement in corruption cases in Indonesia.	Publikasi artikel ilmiah yang membahas strategi penegakan hukum yang lebih efektif. Published scientific articles discussing more effective law enforcement strategies.	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Corruption Eradication Commission (KPK)
4	Studi tentang Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Study on Mediation in Dispute Resolution	Oktober-Desember 2023 October-December 2023	Penelitian tentang penggunaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia. Research on the use of mediation as an alternative dispute resolution in Indonesia.	Panduan praktik mediasi untuk pengacara dan mediator. Mediation practice guidelines for lawyers and mediators.	Asosiasi Pengacara Indonesia Indonesian Bar Association

*Pendidikan dan Riset di Bidang Hukum yang Dilakukan UI Sepanjang Tahun 2023

*Legal Education and Research Initiatives by UI in 2023



SDG 16

Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat
Peace, Justice, and Strong Institutions

Fakultas Hukum UI juga telah melakukan berbagai program penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Salah satu fokus utama penelitian adalah penyelesaian sengketa melalui metode alternatif, seperti mediasi dan arbitrase, yang memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyelesaikan masalah hukum tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan mahal.

The UI Faculty of Law has undertaken numerous research programs focused on enhancing justice and human rights protection in Indonesia. One primary focus of this research is exploring alternative dispute resolution methods, such as mediation and arbitration, which offer broader public access to resolving legal disputes without enduring lengthy and costly litigation processes.



Mahasiswa Fasilkom UI melalui Tim Three Neuron V2 berhasil meraih juara 1 dalam kompetisi Satria Data 2023. AI buatan mereka sukses mendeteksi ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan.

Fasilkom UI students, through the Three Neuron V2 Team, won 1st place in the 2023 Satria Data competition. Their AI successfully detected inconsistencies in laws and regulations.

Program penelitian ini mengembangkan inovasi dalam desain sistem penyelesaian sengketa yang lebih efektif, yang mempertimbangkan konteks sosial dan budaya lokal. Penelitian ini tidak hanya berkontribusi terhadap pengembangan teori hukum, tetapi juga memiliki dampak praktis dalam peningkatan akses keadilan bagi masyarakat, terutama di daerah yang terpencil. Melalui kolaborasi dengan lembaga pemerintahan dan organisasi non-pemerintah, fakultas berupaya untuk menerapkan hasil penelitian dalam kebijakan publik yang mendukung keadilan sosial.

UI's research initiatives include innovative approaches to designing more effective dispute resolution systems that account for local social and cultural contexts. This research not only contributes to legal theory development but also has practical implications for improving access to justice, particularly for communities in remote areas. Through partnerships with government agencies and non-governmental organizations, the faculty aims to implement research findings into public policies that promote social justice.



Perkembangan teknologi informasi membuat bahasa semakin kompleks. Linguistik forensik hadir sebagai solusi untuk mengungkap kebenaran di balik kata-kata, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan media sosial. Dengan menganalisis multimodalitas, ahli linguistik forensik dapat memberikan bukti yang kuat dalam persidangan.

The development of information technology has made language increasingly complex. Forensic linguistics emerges as a solution to uncover the truth behind words, especially in cases involving social media. By analyzing multimodality, forensic linguistics experts can provide strong evidence in court.

Selain itu, penelitian yang dilakukan di UI juga berfokus pada perlindungan hak asasi manusia, termasuk studi tentang pelanggaran hak yang sering terjadi dan strategi untuk meningkatkan kesadaran serta perlindungan terhadap hak-hak individu. Keterlibatan mahasiswa dalam riset ini menjadi penting, karena mereka tidak hanya belajar secara teori, tetapi juga berkontribusi secara langsung dalam pengembangan solusi yang dapat diterapkan di masyarakat.

Dalam upaya untuk mengedukasi masyarakat dan meningkatkan kesadaran hukum, fakultas hukum juga menyelenggarakan seminar dan lokakarya yang mengundang praktisi hukum, akademisi, dan mahasiswa untuk berdiskusi mengenai isu-isu terkini dalam bidang hukum dan keadilan. Dengan cara ini, UI tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum dan berkeadilan.

Revisi UU Perkoperasian bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan koperasi. Menkop UKM RI Teten Masduki menyampaikan harapannya agar koperasi Indonesia semakin kuat dan berkontribusi pada perekonomian nasional.

Keterlibatan aktif UI dalam penelitian dan inovasi di bidang hukum dan keadilan mencerminkan komitmennya untuk mendukung pencapaian SDG 16, yang menekankan pentingnya keadilan dan kelembagaan yang kuat sebagai landasan bagi pembangunan berkelanjutan. Melalui riset yang berkualitas dan relevan, UI berkontribusi dalam membangun sistem hukum yang lebih baik dan memberikan akses keadilan yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat.

PROGRAM EDUKASI DAN KESADARAN

Kurikulum dan Pelatihan

Universitas Indonesia menawarkan program akademik yang komprehensif, berfokus pada pengembangan kompetensi dalam bidang hak asasi manusia, hukum internasional, dan mediasi. Kurikulum di Fakultas Hukum dirancang untuk mencakup berbagai aspek hukum yang relevan, memberikan mahasiswa pemahaman mendalam tentang peran hukum dalam menjaga keadilan dan mempromosikan perdamaian. Melalui mata kuliah yang diintegrasikan dengan praktik, mahasiswa tidak hanya belajar teori tetapi juga cara menerapkannya dalam konteks nyata.

Pemerintah berniat mempermudah administrasi pajak dengan mengintegrasikan NIK dan NPWP. Namun, kebijakan ini masih menimbulkan kekhawatiran akan keamanan data pribadi wajib pajak.

Program pelatihan juga diselenggarakan secara berkala, dengan melibatkan praktisi hukum dan akademisi sebagai narasumber. Ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk berinteraksi langsung dengan para ahli dan mendiskusikan isu-isu hukum terkini, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum di Indonesia.

Furthermore, UI's research efforts extend to human rights protection, including studies on recurring violations and strategies to increase awareness and safeguard individual rights. Student involvement in these research projects is essential, as it allows them to move beyond theoretical learning and contribute directly to the development of applicable solutions for societal challenges.

To promote legal awareness and educate the public, the UI Faculty of Law organizes seminars and workshops featuring legal practitioners, academics, and students to discuss pressing issues in the fields of law and justice. This engagement ensures that UI not only contributes to academic advancements but also plays an active role in fostering a more legally conscious and just society.

The revision of the Cooperative Law aims to create a conducive ecosystem for the growth of cooperatives. The Indonesian Minister of Cooperatives and SMEs, Teten Masduki, expressed his hope that Indonesian cooperatives will become stronger and contribute to the national economy.

UI's active engagement in legal research and innovation reflects its dedication to supporting SDG 16, which highlights the importance of justice and robust institutions as pillars of sustainable development. By producing high-quality, relevant research, UI works toward building a better legal system and expanding access to justice for all members of society.

EDUCATION AND AWARENESS PROGRAMS

Curriculum and Training

UI offers a comprehensive academic program that focuses on building competencies in human rights, international law, and mediation. The Faculty of Law's curriculum is designed to cover a broad spectrum of legal aspects, providing students with a deep understanding of the role of law in upholding justice and promoting peace. Through a combination of theoretical and practical courses, students learn how to apply legal principles in real-world contexts.

The government intends to simplify tax administration by integrating NIK (National Identification Number) and NPWP (Taxpayer Identification Number). However, this policy has raised concerns about the security of taxpayers' personal data.

Additionally, periodic training programs are conducted, featuring legal practitioners and academics as speakers. These sessions give students opportunities to engage directly with experts and discuss contemporary legal issues and challenges in Indonesia's legal system. Such training aims to prepare students to become professionals capable



SDG 16

Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat Peace, Justice, and Strong Institutions

Pelatihan ini bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi profesional yang mampu berkontribusi secara signifikan dalam penguatan sistem hukum dan keadilan di masyarakat.

The 29th International Seminar on Sea Names membahas isu-isu internasional terkait penamaan geografis khususnya di wilayah perbatasan, nilai-nilai perdamaian, warisan budaya, dan kajian toponimi lainnya. Seminar diawali dengan mendiskusikan penamaan wilayah perairan yang terletak antara Semenanjung Korea dan Jepang.

Inisiatif Kesadaran Masyarakat

UI juga aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keadilan dan perdamaian melalui berbagai inisiatif. Kegiatan kampanye yang melibatkan mahasiswa dan komunitas lokal menjadi salah satu strategi utama. Melalui seminar, lokakarya, dan diskusi publik, UI berupaya mendidik masyarakat mengenai hak-hak mereka dan cara untuk mengakses keadilan. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan masyarakat, tetapi juga membangun kesadaran kolektif tentang nilai-nilai keadilan dan perdamaian.

Pertunjukan opera bertajuk Pancasila Voice of Humanity menyampaikan pesan-pesan kemanusiaan melalui berbagai lagu daerah dan nasional, diantaranya "Lilin-lilin Kecil", "We Are The World", "Gundul Gundul Pacul", dan "Indonesia Pusaka". Pertunjukan ini membawa pesan kesatuan dan perdamaian seperti terkandung dalam nilai-nilai Pancasila.

Sebagai bagian dari inisiatif ini, UI bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk melaksanakan program-program yang bertujuan untuk mendukung penguatan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Keterlibatan aktif mahasiswa dalam program-program ini memberikan mereka pengalaman berharga dalam menerapkan pengetahuan akademis ke dalam praktik nyata di lapangan.

Dengan demikian, program edukasi dan kesadaran yang diterapkan di UI mencerminkan komitmen universitas untuk berkontribusi pada pencapaian SDG 16. Melalui pendidikan yang berkualitas dan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, UI berupaya membangun masyarakat yang lebih adil dan damai, serta memperkuat kelembagaan yang diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

KETERLIBATAN MASYARAKAT DAN KEMITRAAN

Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan

Universitas Indonesia menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah (LSM), dan komunitas lokal untuk mendukung program-program keadilan sosial. Kemitraan ini berfokus pada penguatan tata kelola dan transparansi, yang merupakan elemen kunci dalam mencapai tujuan SDG 16. Melalui kolaborasi ini, UI berupaya memperkuat kapasitas lembaga-lembaga lokal dalam mengatasi isu-isu hukum dan sosial yang dihadapi masyarakat.

of contributing meaningfully to strengthening the legal system and promoting justice in society.

The 29th International Seminar on Sea Names discussed international issues related to geographical naming, particularly in border areas, peace values, cultural heritage, and other toponymic studies. The seminar began with a discussion on naming the waters located between the Korean Peninsula and Japan.

Public Awareness Initiatives

UI is committed to raising public awareness about the importance of justice and peace through a range of initiatives. Campaign activities involving students and local communities are a key strategy. By organizing seminars, workshops, and public discussions, UI educates the public about their rights and how to access justice. These initiatives not only enhance public knowledge but also foster collective awareness of the values of justice and peace.

The opera performance titled "Pancasila Voice of Humanity" conveyed messages of humanity through various regional and national songs, including "Lilin-lilin Kecil", "We Are The World", "Gundul Gundul Pacul", and "Indonesia Pusaka". This performance carried a message of unity and peace, reflecting the values of Pancasila.

As part of this effort, UI collaborates with government agencies and non-governmental organizations to implement programs that support legal strengthening and human rights protection. The active participation of students in these programs provides valuable experience, enabling them to apply academic knowledge to real-world challenges.

The education and awareness programs implemented by UI reflect its commitment to contributing to the realization of SDG 16. Through quality education and public outreach efforts, UI strives to build a more just and peaceful society and strengthen the institutions necessary to support sustainable development in Indonesia.

COMMUNITY ENGAGEMENT AND PARTNERSHIPS

Collaboration with Stakeholders

UI maintains strategic partnerships with various stakeholders, including government agencies, non-governmental organizations (NGOs), and local communities, to support social justice programs. These collaborations emphasize strengthening governance and transparency, which are crucial for achieving SDG 16. By engaging in such partnerships, UI aims to build the capacity of local institutions to address the legal and social challenges faced by communities.



Konflik antara masyarakat adat dan investor asing masih menjadi persoalan serius di Indonesia. FGD FHUI bahas solusi hukum untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dalam konteks investasi.

Sebagai contoh, UI terlibat dalam berbagai proyek yang bertujuan untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat yang kurang terlayani. Ini mencakup penyelenggaraan klinik hukum yang memberikan bantuan hukum gratis, serta seminar dan lokakarya yang mendidik masyarakat tentang hak-hak mereka. Kolaborasi ini tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, tetapi juga memperkaya pengalaman belajar mahasiswa melalui keterlibatan praktis dalam program-program pelayanan masyarakat.

Program Pengabdian Masyarakat

UI juga melaksanakan berbagai program pengabdian masyarakat yang bertujuan mendukung penyelesaian konflik dan perdamaian. Program ini melibatkan mahasiswa dalam kegiatan yang fokus pada mediasi dan resolusi konflik, memberikan mereka kesempatan untuk menerapkan teori yang dipelajari di kelas ke dalam praktik nyata. Dengan melakukan pendekatan yang berbasis pada dialog dan kerja sama, mahasiswa dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih damai dan harmonis dalam masyarakat.

Salah satu inisiatif penting adalah program pelatihan mediasi yang melibatkan mahasiswa dan anggota masyarakat. Program ini mengajarkan teknik-teknik penyelesaian konflik yang efektif, serta membekali peserta dengan keterampilan untuk mendukung dialog antar pihak yang berselisih. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perdamaian dan keadilan dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi semua.

Melalui keterlibatan masyarakat dan kemitraan yang kuat, UI menunjukkan komitmennya untuk menjadi motor penggerak dalam pencapaian SDG 16. Dengan melibatkan mahasiswa dan komunitas dalam upaya mencapai keadilan dan perdamaian, UI tidak hanya mendidik generasi masa depan tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Conflicts between indigenous communities and foreign investors remain a serious issue in Indonesia. The FHUI Focus Group Discussion (FGD) explored legal solutions to protect the rights of indigenous communities in the context of investment.

For instance, UI is involved in multiple projects to improve access to justice for underserved communities. These efforts include organizing legal clinics that provide free legal aid and hosting seminars and workshops to educate the public on their rights. This collaboration not only directly benefits the community but also enriches students' learning experiences by allowing them to engage in hands-on community service programs.

Community Service Programs

UI implements a range of community service initiatives designed to support conflict resolution and peacebuilding. These programs actively involve students in mediation and conflict resolution activities, giving them opportunities to apply classroom theories in practical, real-world settings. By employing a dialogue-based, collaborative approach, students contribute to creating more peaceful and harmonious societies.

One significant initiative is a mediation training program involving students and community members. This program focuses on teaching effective conflict resolution techniques and equipping participants with the skills to facilitate dialogue among disputing parties. It also aims to raise community awareness of the importance of peace and justice in building a better society for all.

Through community engagement and strong partnerships, UI demonstrates its commitment to being a catalyst for achieving SDG 16. By involving students and communities in efforts to promote justice and peace, UI not only educates future generations but also contributes to sustainable social development.



SDG 16

Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat Peace, Justice, and Strong Institutions

Dalam mendukung pencapaian SDG 16, UI menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam hal dana maupun infrastruktur yang diperlukan untuk melaksanakan program-program keadilan dan perdamaian. Meskipun UI memiliki banyak inisiatif yang menjanjikan, terbatasnya anggaran untuk penelitian dan pengabdian masyarakat dapat menghambat kemampuan institusi dalam melaksanakan proyek yang lebih luas dan berkelanjutan.

Selain itu, terdapat tantangan dalam hal kebijakan, terutama terkait dengan dukungan dari pemerintah dan lembaga lain. Kebijakan yang tidak konsisten atau kurangnya koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan dapat mengurangi efektivitas inisiatif yang dilakukan.

Selain itu, masih ada tantangan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hukum, keadilan, dan peran institusi yang kuat. Masyarakat seringkali tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai hak-hak mereka dan mekanisme hukum yang ada, yang dapat mengakibatkan rendahnya partisipasi dalam program-program yang ditawarkan.

Meningkatkan Peran UI

Meskipun menghadapi tantangan, terdapat banyak peluang bagi UI untuk berperan lebih aktif. Salah satunya adalah melalui penelitian yang lebih mendalam mengenai isu-isu hukum dan sosial yang relevan. UI dapat mengembangkan proyek penelitian yang tidak hanya menghasilkan data, tetapi juga rekomendasi kebijakan yang konkret untuk pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan berfokus pada isu-isu yang mempengaruhi masyarakat, seperti akses keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya mencapai keadilan dan perdamaian.

Advokasi juga merupakan area di mana UI dapat meningkatkan perannya. Melalui program-program advokasi yang melibatkan mahasiswa, UI dapat menyuarakan isu-isu penting dan mendorong perubahan kebijakan yang diperlukan untuk mendukung keadilan sosial. Keterlibatan aktif dalam diskusi publik dan kolaborasi dengan LSM serta komunitas lokal dapat memperkuat posisi UI sebagai pemimpin dalam upaya pencapaian SDG 16.

Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga internasional dapat membuka peluang baru bagi UI dalam mendapatkan sumber daya dan dukungan untuk program-programnya. Kerja sama ini tidak hanya akan meningkatkan kapabilitas UI, tetapi juga memperkuat perannya sebagai institusi pendidikan yang peduli terhadap keadilan dan perdamaian. memperluas dampak dari inisiatif yang dilakukan, memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

In supporting the achievement of SDG 16, UI faces several significant challenges. One major obstacle is the limitation of resources, including funding and infrastructure necessary to implement justice and peace programs. While UI has numerous promising initiatives, a restricted budget for research and community service can impede its ability to execute broader and more sustainable projects.

Policy-related challenges also present difficulties, particularly regarding support from the government and other institutions. Inconsistent policies or a lack of coordination among various stakeholders can diminish the effectiveness of initiatives undertaken.

Another key challenge is raising public awareness about the importance of law, justice, and strong institutions. Many people lack sufficient knowledge of their rights and existing legal mechanisms, which leads to low participation in available programs.

Enhancing UI's Role

Despite these challenges, UI has numerous opportunities to take a more active role. One such opportunity lies in conducting more in-depth research on relevant legal and social issues. UI can develop research projects that not only produce data but also offer concrete policy recommendations for the government and other stakeholders. By focusing on issues affecting communities, such as access to justice and human rights protection, this research can make a meaningful contribution to efforts aimed at achieving justice and peace.

Advocacy is another area where UI can strengthen its impact. Through student-led advocacy programs, UI can highlight critical issues and push for necessary policy changes to promote social justice. Active participation in public discussions and collaborations with NGOs and local communities can reinforce UI's position as a leader in the pursuit of SDG 16.

Moreover, collaboration with the private sector and international institutions presents opportunities for UI to gain additional resources and support for its programs. This collaboration not only enhances UI's capabilities but also strengthens its role as an educational institution dedicated to justice and peace, expanding the reach and impact of its initiatives to provide greater benefits to society.